

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai konsep dasar ilmu sosial bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan dari orang lain, maka terciptalah hubungan antara satu orang dengan orang lain baik dalam ranah kebendaan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Kebutuhan mendasar manusia salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal sebagai tempat bernaung dan menjalankan kehidupannya. Kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat pula. Kebutuhan tanah oleh masyarakat baik untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan lainnya tidak diseimbangi dengan bertambahnya jumlah luas tanah menjadikan tanah sebagai barang yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan data Badan Statistik Nasional, sampai dengan tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 237.641.326 orang. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 10,30 (persen) diantaranya belum memiliki rumah hunian, sehingga masih tinggal di rumah kontrakan.¹ Berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan sebuah negara, maka perlu pengaturan yang jelas, tepat, dan dapat mengakomodasi

¹ http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?table=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1

permasalahan terkait pertanahan, khususnya mengenai hak atas tanah untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan. Pertanahan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa indonesia” dan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.²

Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara memberi kewenangan bagi negara untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan, ruang angkasa; dan

² Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan, ruang angkasa.

Dalam prakteknya hak menguasai oleh negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Berdasarkan hak menguasai oleh negara tersebut kemudian ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi (tanah) diantaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain.

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik, perolehan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan mengenai fungsi sosial yang dimiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUPA. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA, "pada azasnya hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah", disamping itu "oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan syarat-syaratnya".³

Pemenuhan kebutuhan akan tanah dapat dipenuhi dengan alas hak milik atas tanah sebagaimana disebutkan di atas. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut timbul adanya hubungan antara satu atau lebih dari orang

³Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

dengan orang lain yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak atas tanah tersebut. Dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain dari segi hukum terdapat sesuatu yang dinamakan perikatan. Perikatan berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Perikatan itu sendiri berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dalam hal ini adalah perjanjian dan karena undang-undang". Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang berdasarkan Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan yang halal atau dari perbuatan melanggar hukum".⁴

Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya adanya perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian sendiri berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁵ Dalam kaitan dengan peralihan hak atas tanah maka perjanjian memegang peran penting sebagai dasar terjadinya peralihan hak tersebut. Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁵ *Ibid*, hal.338

3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Dalam transaksi pengalihan tanah, perikatan yang tersebut akan mempengaruhi keabsahan hak milik atas tanah. Hal itu dikarenakan perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum yang berupa penentuan kedudukan hukum atas suatu objek. Di kehidupan masyarakat terdapat sengketa tanah yang disebabkan oleh perikatan yang tidak sah. Sengketa tanah yang disebabkan oleh perikatan yang tidak sah seharusnya tidak terjadi dalam kasus pertanahan, mengingat sistem hukum pertanahan Indonesia yang cukup komprehensif mengatur mengenai hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah. Seperti yang diatur dalam UUPA dan aturan pelaksanaannya bahwa peralihan hak atas tanah harus dengan akta PPAT yang merupakan syarat utama untuk proses selanjutnya yaitu proses pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan, perikatan yang tidak sah secara hukum yang kemudian dituangkan dalam akta PPAT digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dalam keadaan tertentu mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, dalam hal ini terdapat lebih dari satu sertifikat yang menyatakan kepemilikan atas suatu objek yang berbeda. Keadaan dimana terdapat lebih dari satu sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang memuat kepemilikan hak yang berbeda dapat melibatkan banyak pihak diantaranya,

pihak yang dalam sertifikat hak atas tanah dinyatakan sebagai pemilik hak, pihak aparat desa, PPAT, dan juga Badan Pertanahan Nasional yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu sertifikat. Keadaan itu yang kemudian menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Pada prinsipnya, perikatan yang tidak sah mengakibatkan akta PPAT tersebut juga tidak sah secara hukum, sehingga sertifikat yang diterbitkan juga cacat hukum secara hukum. Adanya cacat hukum administrasi atas sertifikat hak milik atas tanah biasanya dapat disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan dari para pihak ataupun juga petugas kantor Badan Pertanahan Nasional yang dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. Oleh karena itu, proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas atas penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

Mengingat banyaknya kasus mengenai kecacatan hak atas tanah di pengadilan baik yang sudah selesai maupun belum selesai, maka menimbulkan pemikiran untuk peneliti lebih lanjut mengenai pokok sengketa tersebut sehingga dapat diketahui akar permasalahan, bagaimana sengketa tersebut di putus, dan juga solusi agar sengketa hal sama tidak terjadi dikemudian hari. Salah satu contoh sengketa pertanahan terkait perikatan yang tidak sah yang kemudian mengakibatkan kecacatan sertifikat hak milik atas tanah adalah kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati

yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sragen dan diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg), yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 268/Pdt/2008/PT.Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2009. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai kasus kecacatan sertifikat hak milik tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KECACATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Studi kasus atas Kecacatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 815 Atas Nama Siti Rukmiyati Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Reg.No. 42/Pdt.G/2007/PN.Srg. Yang Diperkuat Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg Dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009).**

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, pada dasarnya membutuhkan perumusan masalah untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Sebelum memasuki perumusan masalah, alangkah baiknya apabila penulis memberikan definisi tentang masalah itu sendiri.

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Majelis Hakim, pertimbangan yang mendasari putusan, dan sinkronisasi atas perkara kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009?
2. Bagaimana tinjauan yuridis atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan subyektif dan tujuan obyektif sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana putusan Majelis Hakim, pertimbangan yang mendasari putusan, dan sinkronisasi atas perkara kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan

Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009.

- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan hukum sebagai pemenuhan syarat akademis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat penelitian

Adapun penelitian berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah

nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca/masyarakat sehingga pembaca/masyarakat mengetahui bagaimana bisa terjadi sengketa yang menyebabkan bisa munculnya sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati.

3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai masalah tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah, berdasarkan alas hak yang tidak sah. (Studi kasus atas kecacatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 815 Atas Nama Siti Rukmiyati Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Reg.No. 42/Pdt.G/2007/PN.Srg Yang Diperkuat Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg Dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009).

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan

mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan sosiologis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kebenaran yang diperoleh dari kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum, baik aspek hukum tertulis yaitu undang-undang maupun aspek hukum tidak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, misalnya itikad baik, kesusilaan, ketertiban umum, kepantasan, kelayakan, dll yang berkaitan dengan sengketa kecacatan sertifikat hak milik atas tanah. Sehingga dapat diketahui aspek hukum yang melatar belakangi atau yang menyebabkan terjadinya kecacatan sertifikat hak milik atas tanah.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, hlm 3.

dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁷ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai kasus atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg, tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati.

3. Sumber Data

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang meliputi :

- a) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, hlm 12.

⁸ Abdul Kadir dan Joko Poerwono, *Metodologi Penelitian II*, UNS Press Surakarta, 1988, hal 6

- d) Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg.
- e) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg; dan
- f) Salinan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah dan hasil hukum yang ada hubungannya dengan Tinjauan Yuridis Tentang Kecacatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

b. Sumber Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sragen.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah responden dalam penelitian ini adalah Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah, atas kepemilikan yang tidak sah yang menyebabkan kecacatan sertifikat nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati di Pengadilan Negeri Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepastakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.⁹

2) Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

interaksi dan komunikasi.¹⁰ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang pernah memutus perkara Tentang Kecacatan sertifikat hak milik atas tanah nomor 815 atas nama Siti Rukmiyati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sample dengan quota sampling yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu diambil sebagai sample. Namun sebagian dengan kriteria bahwa seseorang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang masalah yang mengenai tinjauan yuridis tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah. Sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang dijadikan sample adalah Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang kecacatan sertifikat hak milik atas tanah (Studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.268/Pdt/2008/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/PDT/2009).

¹⁰ Kenny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang: Ghalia Indonesia, hal.57.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Tinjauan Yuridis Tentang Kecacatan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. Dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.